

B.R.M.G. SAYIDIN MALIKUL KUSNO: PELOPOR PENDIDIKAN MASYARAKAT

Hermanu Joebagio
FKIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article analyzes the existence of Madrasah Mamba'ul Ulum, HIS Kasatryan and HIS Pamardi Putri in the political constellation of the movements in 1920s. These educational institutions were established in the area of the Kasunanan Palace. Madrasah Mamba'ul Ulum consisted of elementary school, junior high school and senior high school, catering for children of abdi dalem (servants in the palace) and those of lay people. On the other hand, HIS Kasatryan and HIS Pamardi Putri were elementary schools for children of lower aristocrats. The founders of the institutions gave freedom to the managers to make decisions concerning education (school-based management) in terms of the curriculum, teachers, learning materials, learning strategies, and evaluation system. Even society members were allowed to take part in the implementation (community-based education). The local contents, the Javanese culture and Islam were the subjects that guided the students' ethics and moral so that they developed as individuals who were responsible and just and capable of protecting their fellow people.

Keywords: Madrasah Mamba'ul Ulum, HIS Kasatryan, HIS Pamardi Putri, Javanese culture, Islam

A. Pendahuluan

Perubahan ekologi melanda Surakarta ketika pembelajaran di sekolah tidak menyertakan aspek lokal (budaya Jawa dan agama Islam), dan sekolah hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat, sehingga merupakan hal mustahil bagi kelompok masyarakat kelas bawah. Sejak tahun 1852 di Surakarta sudah didirikan *Europesche Lagere School* (Sekolah Dasar Eropa), dan *Kweekschool* (Sekolah Guru). Sekolah Guru yang didirikan pertama kali di Surakarta ternyata tidak diminati anak-anak priyayi, sehingga satu dasawarsa kemudian harus dipindahkan ke Magelang (Scherer, 1985: 43-44).

Dalam *Regeringsreglement* 1854 mewajibkan pemerintah untuk melakukan perluasan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tetapi kenyataannya, belum dapat dilaksanakan karena tiada biaya pendidikan yang memadai, dan pada sisi lain belum terbentuk Departemen Pengajaran dan Agama (van der Veur, 1969: 1). Ketidakberdayaan pemerintah Hindia Belanda berakibat peran mengembangkan persekolahan diambil alih oleh *zending* dan *missi* (Adam, 2003: 30).

Politik pendidikan *zending* dan *missi* merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda lebih mengutamakan anak-

anak priyayi, dan kebijakan itu merupakan implementasi dari strategi *kersteningpolitiek* serta sekularisasi terhadap kelompok priyayi, meskipun angkatan sekolah anak-anak kelas sosial bawah makin membengkak sejak diberlakukan Undang-Undang Agraria 1870 (Suminto, 1985: 23-25; Cf. Maarif, 1985: 66). Anak-anak priyayi ditafsirkan dapat menjembatani kepentingan politik Belanda, dan politik pendidikan itu makin membangkitkan keniscayaan masyarakat kelas bawah untuk memperoleh kesempatan pendidikan formal model Barat. Satu-satunya kesempatan masyarakat kelas bawah adalah pendidikan nonformal keagamaan di pesantren.

Ketidakberdayaan pemerintah berakibat pertumbuhan persekolahan di Surakarta sangat lamban karena pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran pendidikan sebesar 25 ribu gulden untuk seluruh Hindia Belanda (dalam Baudet & Brugmans, 1987: 178-179). Bahkan satu dasawarsa kemudian, setelah diberlakukan kebijakan etis (1902-1912) angkatan sekolah kelas sosial bawah di Nusantara hanya tertampung pada *Tweede Klasse School* dan *Volksschool* (van der Veur, 1969: 7). Fenomena ini menunjukkan tanda carut marut pengelolaan sistem pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang tidak berpihak kepada kelas sosial bawah. Fenomena ini memacu keprihatinan elit politik pribumi.

Salah seorang elit yang merasa prihatin terhadap sistem pendidikan adalah Bendara Raden Mas Gusti (BRMG) Sayidin Malikul Kusno, yang setelah naik tahta dikenal bernama Paku Buwana X (PB X). Sejak muda PB X berangan-angan untuk mendirikan sekolah murah bagi anak-anak kelas sosial bawah, baik anak-anak *sentana*,

abdi, maupun *kawula dalem*. Angangan BRMG Malikul Kusno tidak sekedar mendirikan sekolah, tetapi secara simbolik juga mereformasi sistem manajemen sekolah yang secara substansial tidak diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda, baik pada sekolah agama (Madrasah Mamba'ul Ulum, 1905) dan sekolah umum (HIS Kasatryan dan HIS Parmadi Putri, 1914).

Pengertian reformasi manajemen yang dilakukan rupanya identik dengan istilah reformasi manajemen pendidikan abad modern yang mengutamakan aspek *community-based education* dan *school-based management*. Maksudnya, BRMG Malikul Kusno memberi kesempatan yang lebih luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memberi kesempatan yang luas kepada penyelenggara lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan masalah-masalah pengelolaan kegiatan pembelajaran. Reformasi pendidikan yang dilakukan pada awal abad XX merupakan konsekuensi dari diberlakukan Undang-Undang Desentralisasi 1903, yakni Surakarta dan Yogyakarta merupakan daerah otonom (Schrieke, 1918: 14).

B. Pembahasan

1. Diskriminasi Pendidikan

Sejak tahun 1850-an kota-kota besar di Jawa sudah berdiri Sekolah Dasar Eropa yang diperuntukan anak-anak *pangreh praja* dan aristokrat Jawa, dan bukan untuk anak-anak masyarakat umum. Kehadiran Sekolah Dasar Eropa di Surakarta menimbulkan polemik, karena adanya faktor diskriminasi, dan pada sisi lain masyarakat Surakarta sudah tumbuh menjadi masyarakat multi-etnis akibat pertumbuhan jalur

perdagangan sungai dari Bandar Semanggi (Surakarta) menuju Bandar Surabaya, dan sebaliknya (Soedarmono, Kusumastuti & Rizon Pamardi Utomo, 2004: 3-4; Cf. Robson, 1981: 279). Melalui perdagangan tersebut lahir kontak budaya lintas etnik maupun lintas bangsa. Artefak sosial yang tersisa dapat diamati dari keberadaan komunitas Arab di Pasar Kliwon; Cina di Pasar Gede; etnik Bali di Kebalen; etnik Madura di Sampangan; etnik Banjar dan Flores di dekat Kepatihan; pengusahaan batik di Laweyan, Kauman, dan Keprabon; dan pedagang-pedagang Jawa di kampung Sewu.

Pertumbuhan pendidikan yang disertai dengan diskriminasi menimbulkan polemik antarpihak pengelola (*zending* dan *missi*) dan aristokrat, ulama maupun pujangga. Inti polemik adalah: (1) sistem pendidikan Barat mempraktekan nilai-nilai sekularisme; (2) menciptakan diskriminasi sosial karena yang dapat belajar di lembaga itu adalah anak-anak *pangreh praja* dan aristokrat. Sementara itu, anak-anak pengusahaan batik dan pelaku ekonomi lainnya yang memiliki status ekonomi tinggi diabaikan oleh sistem pendidikan kolonial; (3) di lembaga pendidikan *zending* dan *missi* tidak diajarkan pendidikan agama Islam dan kebudayaan Jawa. Hal terakhir ini yang dipandang ulama dan pujangga dapat merusak kepribadian anak-anak *pangreh praja* dan aristokrat tradisional.

Dalam pemikiran aristokrat, pujangga, dan ulama bahwa agama Islam maupun kebudayaan Jawa adalah pendidikan moral dan etika untuk seluruh anak pribumi. Agama Islam merupakan sistem keyakinan, sedangkan budaya Jawa adalah ajaran-ajaran tentang falsafah kehidupan yang diyakini oleh masyarakat Jawa. Alasan lain, sejak

tahun 1833 di Surakarta sudah berdiri *Instituut voor de Javaansche Taal* (Lembaga Bahasa Jawa), yang dipelopori filolog J.A. Wilkens, Taco Roorda van Eysinga, dan C.F. Winter (Ahmat Adam, 2003: 30; Cf. S. Margana, 2004: 15-44). Meskipun Lembaga Bahasa Jawa telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial pada 1853, kajian sastra dan nilai budaya Jawa tetap dilanjutkan oleh Raden Panji, Raden Ngabei (RNg) Reksodipuro, bersama-sama dengan para filolog Eropa.

Diskriminasi pendidikan juga melanda pada anak-anak *pangreh praja* dan aristocrat. Landasan diskriminasi pendidikan di Sekolah Dasar Eropa mengikuti besar-kecilnya pendapatan dan status sosial orang tua murid. Lebih lanjut dikemukakan bahwa:

Sejak 1864 orang-orang Jawa telah diterima dalam sekolah dasar Belanda, ELS. Uang sekolah tertinggi bagi anak-anak Eropa adalah 8 *gulden* per bulan. Anak-anak Eropa yang pendapatan orang-tuanya kurang dari 150 *gulden* per bulan diterima tanpa bayar. Sebaliknya, anak-anak Jawa harus membayar (tanpa ada peraturan pengecualian pembayaran) 15 *gulden* per bulan, hampir dua kali lipat pembayaran tertinggi anak-anak Eropa. Uang sekolah sekali lagi dinaikkan dua kali lipat [30 *gulden* per bulan] ... bagi anak-anak Jawa dari golongan menengah dan atas (Scherer, 1985: 44).

Untuk dapat memasuki ELS secara tegas ditentukan pendapatan orang tua minimal 400 *gulden* per bulan. Pendapatan sebesar itu jarang dimiliki kelompok masyarakat umum. Gaji bupati hanya 1000 *gulden* per bulan, asisten wedana sekitar 150 *gulden* per bulan, dan dokter (Jawa) 150 *gulden* per bulan (Savitri Prastiti Scherer, 1985: 44). Kenyataan di atas menunjukkan bahwa

anak-anak pribumi sekelas pengusaha batik sekalipun tidak dapat memasuki Sekolah Dasar Eropa.

Diskriminasi pendidikan yang berpijak pada struktur sosial sengaja diciptakan, yang tanpa disadari berakibat munculnya kesenjangan sosial antara rakyat dan priyayi (*pangreh praja* dan aristokrat). Bahkan tidak adanya pengajaran agama Islam dan kebudayaan Jawa dalam sistem pendidikan di Surakarta dan Yogyakarta merupakan sesuatu yang diciptakan. Dalam hubungan ini Frances Gouda mengemukakan:

"... arti budaya tradisional kehilangan makna "alami"nya—atau keutuhan metafisiknya—karena budaya ini sekarang diajarkan dengan nilai-nilai Barat dan teknologi Eropa, yang membuka prospek intelektual baru dan kemungkinan pilihan politik yang segar. ... suatu penentangan yang timbul karena kecanggihan dan modernitas, dibandingkan dengan orang tua mereka, yang tidak sempat mengenyam manfaat pendidikan Barat. Barangkali [hal ini] menyiratkan pembunuhan psikologis seorang tokoh ayah (Frances Gouda, 2007: 144).

Pemikiran Frances Gouda menyiratkan bahwa pelapisan sosial dalam sistem pendidikan cenderung diciptakan

dan dilestarikan, karena melalui tangan anak-anak priyayi (*pangreh praja* dan aristokrat) berbagai kepentingan pemerintah dapat terjembatani. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pemerintah sama sekali tidak menginginkan adanya mobilitas vertikal kelas sosial bawah karena mobilitas vertikal tersebut dapat mengganggu eksistensi pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Baudet (Baudet & Brugmans, 1987, 6-7), diskriminasi dan ketidakseriusan dalam pengelolaan sistem pendidikan merupakan ironi dari propaganda *vocation civilisatrice* atau *Een Eereschuld*. Bahkan satu dasawarsa setelah diberlakukannya politik etis banyak anak-anak rakyat yang belum tertampung dan berkesempatan menikmati sistem persekolahan di Hindia Belanda. Menanjaknya pertumbuhan penduduk dan persentase anak-anak pribumi yang menikmati sistem persekolahan baru dimulai pada tahun 1930-an. Besarnya anak-anak pribumi yang mengenyam Sekolah Kelas Dua atau *Volksschool* di seluruh Hindia Belanda dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Murid Pribumi di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan

Tahun	Tweede Klasse School	Volksschool	Vervolgschool	MULO	Jumlah
1900	98.173	-	-	-	98.173
1910	232.629	71.239	-	-	303.868
1920	357.970	423.314	-	-	781.284
1930	339.594	1.229.666	97.236	-	1.666.496
1935	12.154	1.595.140	214.326	-	1.821.620
1940	9.759	1.896.374	287.126	399	2.220.513

Sumber: Paul W. van der Veur. 1969. *Education and Social Change in Colonial Indonesia*. Athens, Ohio: Center for International Studies, Ohio University, hlm. 7.

Sementara itu, pertumbuhan penduduk pribumi Karesidenan Surakarta

sangat tinggi, dan tidak sebanding de-

ngan penyediaan sarana pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penduduk Pribumi Karesidenan Surakarta 1920-1930

Kabupaten	Penduduk Pribumi		% Pertumbuhan	
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
Surakarta	183.107	184.046	23%	22%
Sragen	160.785	160.600	21%	19%
Klaten	277.358	292.063	34%	35%
Boyolali	186.151	180.384	23%	22%
Jumlah	807.401	817.093		

Sumber: Moordiaty, "Dinamika Pertumbuhan Penduduk di Karesidenan Surakarta 1880-1930", *Lembaran Sejarah*, Vol. 4, No. 1, 2000, p. 135.

Dua tabel di atas apabila ditempatkan pada konteks Karesidenan Surakarta menunjukkan bahwa anak-anak kelas sosial menengah bawah yang mengenyam Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) maupun Sekolah Rakyat (*Volksschool*) tentu sangat kecil. Keterbatasan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan merupakan faktor utama lambannya pertumbuhan pendidikan di Hindia Belanda. Menurut Lombard perluasan pendidikan baru mulai berjalan pada tahun 1860 hingga 1898 yang terpusat di Jawa.

Ada tiga aspek yang menjadi landasannya: (1) banyak anak-anak pejabat Belanda yang tinggal di pulau ini; (2) pemerintah membutuhkan tenaga terampil seiring dengan kebijakan ekonomi liberal; (3) memberi peluang pendidikan bagi anak-anak *pangreh praja* (Lombard, 2005: 84). Pada sisi lain, anak-anak pedagang dan pengusaha pribumi justru memilih memasukan anak-anaknya pada lembaga pendidikan Islam daripada sekolah sekuler yang dikelola *zending* dan *missi*. Persoalan utama para pedagang dan pengusaha pribumi adalah menginginkan terjaminnya etika dan moral, serta tersedianya interaksi sosial secara har-

monis dalam lingkungan pendidikan anak-anak.

2. Membangun Keberpihakan

Carut marut sistem persekolahan di Surakarta mendorong BRMG Malikul Kusno mendirikan lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah umum yang terjangkau bagi seluruh lapisan sosial dan berbasis pada masyarakat. Ketika Kanjeng Raden Tumenggung Pengulu (KRTP) Tapsiranom V, *Pepatih Dalem* Kanjeng Raden Adipati (KRA) Sasradiningrat, Kyai Idris (Pesantren Jamsaren), dan ulama-ulama Surakarta menyampaikan pemikiran tentang pentingnya mendirikan sekolah agama (disebut Madrasah Mamba'ul Ulum) dan sekolah umum (disebut HIS Kasatryan dan HIS Parmadi Putri) kepada BRMG Malikul Kusno, ditanggapi beliau secara serius serta disetujui pemikiran tersebut. Selanjutnya BRMG Malikul Kusno memerintahkan mendirikan madrasah di lingkungan Masjid Agung, sedangkan pendirian sekolah umum berada di dalam benteng keraton (Basit Adnan, 1982: 17).

Berdirinya Madrasah Mamba'ul Ulum (1905), HIS Kasatryan, dan HIS Pamardi Putri (1914) secara simbolik merupakan keinginan mengembangkan pendidikan yang berpijak pada *com-*

munity-based education dan *school-based management*, dan konsep tersebut kontra terhadap diskriminasi pendidikan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda. Pada dasarnya politik pendidikan BRMG Malikul Kusno pada dasawarsa pertama abad XX berkaitan dengan pencitraan politik lokal yang menampilkan Islam sebagai kekuatan politik.

Untuk mencitrakan tumbuhnya politik lokal, BRMG Malikul Kusno mengembalikan posisi ulama sebagai 'intelektual pendidik' yang secara simbolik ditandai dengan berdirinya Madrasah Mamba'ul Ulum 1905 di lingkungan keraton. Kehendak menempatkan kembali ulama sebagai 'intelektual pendidik' mempunyai arti penting dalam meletakkan landasan tumbuhnya politik lokal. Selama dua dasawarsa terakhir abad XIX hingga awal abad XX, sebagian besar ulama di Keresidenan Surakarta aktif dalam gerakan radikalisme yang berideologi keagamaan. Para ulama mengorganisasi dan memobilisasi kekuatan massa untuk melawan hegemoni pemerintah kolonial, tetapi gagal dalam mewujudkan tujuan karena sifat arkhaisnya. Organisasi, strategi dan taktik para ulama sangat sederhana, sedangkan tujuannya bersifat lokal (Suryo, 1980: 21).

Keterlibatan ulama dalam gerakan radikalisme berakibat negatif, yakni terganggunya pengembangan pendidikan Islam bagi anak-anak pribumi. Kebijakan etis kemudian dijadikan titik awal oleh BRMG Malikul Kusno untuk membangun pendidikan Islam secara modern, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan itu dibutuhkan peran ulama intelektual. Tanpa disadari berkembangnya pendidikan Islam (madrasah) berkorelasi dengan pertumbuhan politik lokal, karena eksistensi madrasah

dan pesantren merupakan pendukung partai Islam (Sarekat Islam), partai lokal Surakarta (Akira Nagazumi, 1989: 195-196).

Sementara itu untuk memperkuat citra politik lokal BRMG Malikul Kusno memberi dorongan kepada kaum intelektual untuk melakukan gerakan kontra kolonialisme melalui organisasi sosial dan politik. Dorongan itu dilandasi pemikiran bahwa pada masa penjajahan, kaum intelektual dibedakan dalam dua kategori, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik (Latif, 2005: 23). Kategori intelektual tradisional apabila aktivitas kepakarannya ditambahkan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kategori intelektual organik apabila aktivitas kepakarannya diabdikan untuk kepentingan publik, baik pada medan ekonomi, politik, maupun sosial. Intelektual organik dipersepsikan sebagai pemimpin yang memiliki *ethos*, *pathos*, dan *logos* (Anwar, 2007: 121). *Ethos* adalah semangat yang dilandasi akhlak baik, *pathos* adalah kemampuan menggerakkan rakyat secara emosional, sedangkan *logos* adalah kesanggupan menggerakkan masyarakat secara intelektual. Intelektual organik dipandang mampu membangun kesepakatan (musyawarah), baik perspektif tujuan maupun prinsip yang bakal ditegakkan dalam menghadapi kekuatan asing atau menghasilkan otoritas legislatif guna memutuskan perkara-perkara duniawi yang penuh (Mujani, 2007: 56).

Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan di Surakarta yang dibidani dan dikelola elit pribumi berperan untuk: (1) mereproduksi identitas; (2) memajukan kecerdasan peserta didik; (3) memapankan akar keagamaan untuk menyikapi kemodernan; dan (4) mapannya nilai-nilai keagamaan dapat di-

gunakan sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang berseberangan dengan kaidah agama. Semangat elit pribumi untuk mendirikan madrasah dan sekolah umum merupakan usaha serius untuk mengarungi jalan kemajuan (Latif, 2005: 139). Dalam hubungannya dengan mengarungi jalan kemajuan, Yudi Latif mengemukakan:

Kemunculan madrasah merepresentasikan suatu trayek sejarah Islam yang baru. Madrasah merupakan perwujudan rencana kaum reformis-modernis untuk memulihkan dan meremajakan kembali masyarakat Islam. Karena kampanye untuk mereformasi masyarakat muslim melalui jalan kembali kepada sumber asli Islam, [karena itu] sekolah [madrasah] mempresentasikan ide reformisme Islam. Karena adopsinya terhadap pendekatan dan instrumen modern, seperti rasionalisme modern, kurikulum pendidikan Barat, dan aparatus modern, sekolah [madrasah] ini merepresentasikan ide-ide modernisme Islam. Karena pengajarannya yang memasukkan pengetahuan agama dan pengetahuan saintifik modern, madrasah berfungsi sebagai ladang persemaian utama bagi pembentukan "ulama-intelek" yang akan menjadi pasangan utama bagi intelegensia dalam mengarahkan masyarakat Hindia mengarungi jalan *kemadjoean* (Latif, 2005: 139).

Dalam pemikiran BRMG Malikul Kusno mengarungi jalan kemajuan tidak serta-merta meninggalkan tradisi dan budaya sendiri. Karena itu dalam pendidikan di Madrasah Mamba'ul Ulum, HIS Kasatryan dan HIS Parmadi Putri diajarkan pelajaran kebudayaan Jawa dan agama Islam. Hal ini merupakan usaha mendalam untuk mempertahankan keberlangsungan tradisi dan kebudayaan Jawa, meskipun tidak menutup kemungkinan memanfaatkan kebudayaan Barat secara selektif untuk

mengembangkan tradisi dan kebudayaan Jawa. Keberadaan pendidikan diharapkan dapat membangun kembali kemampuan intelektual anak-anak, memulihkan kehormatan, dan harga diri (Hasan Hanafi dalam Kamdani, 2007: 15; Cf. Nashr Hamid Abu Zayd dalam Zuhairi Misrawi, 2007: 51-105).

Pada sisi lain, Heather Sutherland (1983: 12) meragukan kebudayaan Jawa dapat menjadi landasan dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi dan sosial-politik yang sedang dihadapi masyarakat. Namun demikian apabila dilihat dari segi eksistensi simbol Jawa dan Islam yang melekat dalam madrasah dan sekolah umum dapat ditafsirkan untuk memacu masyarakat agar tidak terjebak oleh kekakuan budaya. Suatu budaya tanpa dilandasi kemauan menerima budaya lain dan mengembangkan pemikiran baru akan menempatkan masyarakat pada lapisan sosial 'pinggiran' yang tidak berguna, bahkan akan tergiring oleh kekuatan-kekuatan untuk memasuki medan pertarungan ideologis yang merugikan diri sendiri. Karena itu perlu melakukan persandingan antara pemikiran lama dan baru, sehingga tidak saling mengeliminasi.

3. Madrasah, Sekolah dan Politik

Pada dasarnya mengarungi jalan kemajuan melalui bidang pendidikan tidak sepenuhnya dikehendaki oleh pemerintah Hindia Belanda, karena kemajuan tersebut dapat berakibat pada meluasnya tuntutan 'kesepadanan', baik dalam hubungannya dengan kesederajatan sosial, ekonomi maupun politik. Dalam keadaan demikian pemerintah yang semula berusaha mempertahankan status quo harus berhadapan dengan tuntutan 'kesepadanan'. Polemik tentang kemajuan pendidikan di

Surakarta menjadi bahan perdebatan di Parlemen Negeri Belanda. Selebaran gelap berjudul "*Een Mohammedaansch Universiteit op Soerakarta*" memprovokasi dan membangkitkan kekhawatiran anggota parlemen tentang kemajuan yang terjadi di Surakarta. Dalam selebaran gelap dikemukakan bahwa Madrasah Mamba'ul Ulum adalah pendidikan Islam yang setara dengan jenjang perguruan tinggi. Kecerdasan masyarakat pribumi yang dididik di perguruan tinggi akan membahayakan eksistensi pemerintah Hindia Belanda, bahkan anggota parlemen menuntut diadakan penyelidikan tentang keberadaan Madrasah Mamba'ul Ulum.

Kasus di atas menunjukkan bahwa peminggiran terhadap lapisan sosial 'pribumi' dalam bidang pendidikan memang disengaja, dan tindakan tersebut selalu dikecam oleh Soekarno dalam debat antarmahasiswa *Technische Hoge School* (THS) di Bandung, pada 4 Agustus 1922. Dalam hubungan ini Soekarno meminta kerjasama antar-tokoh pergerakan untuk meningkatkan intelektualitas dan moral masyarakat, serta membangun Indonesia Raya (Mrazek, 2006: 172). Lebih lanjut, Soekarno mengemukakan:

Hanya sifat-sifat intelektual dan moral [yang] dapat menjadi ukuran bagi kita! Intelektualitas manusia itu bersifat internasional. Kita semua ... percaya bahwa satu-satunya cara Indonesia dapat digerakkan ke depan adalah melalui kerja sama antara tokoh-tokoh terkemuka dengan rakyat. Dan tokoh-tokoh pemimpin itu, akan senantiasa adalah Anda, para mahasiswa. Kerja sama itu mendesak.... Ada khotbah tentang persaudaraan antara kaum putih dengan coklat. Itu mustahil.... Ambil contoh seorang negro dan tempatkan dia bersama seorang Inggris, mari kita andaikan begitu.... Kemudian, cobalah mem-

buat mereka saling bersaudara (Mrazek, 2006: 172-173).

Jalan kemajuan yang dikemukakan Soekarno sebangun dengan kekuasaan politik (Adian, 2008: 7). Maksudnya, pembangunan intelektualitas melalui lembaga pendidikan formal secara teoretik menghasilkan intelektual profesional yang memiliki kreativitas berpikir, berekspresi, serta menyalurkannya dalam ruang publik. Pada sisi lain, intelektualitas yang dimiliki harus mampu mengendalikan nafsu rendah (Adian, 2008: 7). Apa jadinya apabila intelektualitas yang dimiliki tokoh pergerakan menyatu dengan nafsu rendah, dan menyukai aliansi politik dengan kekuatan asing, serta menafikan peran tokoh pergerakan lainnya yang secara aktif membangun nilai-nilai kemanusiaan universal, yaitu *hifdz-din* (kebebasan beragama), *hifdz-nafs* (memelihara kelangsungan hidup), *hifdz-nasl* (menjamin kelangsungan keturunan), *hifdz-mal* (menjamin kepemilikan harta benda), *hifdz-aql* (menjamin kreativitas berpikir, kebebasan ekspresi, dan mengeluarkan pendapat). Semua ini menjadi senjata utama dalam menakar hubungan yang tidak setara antar lapisan sosial penduduk (Ihsan, 2003: 43).

Pertumbuhan sekolah formal di Surakarta seperti Madrasah Mamba'ul Ulum, Madrasah Arabiyah Islamiyah, HIS Kasatryan, HIS Parmadi Putri, Perguruan Muhammadiyah, dan Pesantren Jamsaren merupakan ladang pendidikan politik. Dalam hubungan ini Abdurrachman Surjomihardjo mengemukakan bahwa sekolah nonpemerintah sering dimanfaatkan kaum nasionalis untuk mendidik politik rakyat. Lebih lanjut Abdurrachman Surjomihardjo mengemukakan seperti berikut.

Keterlibatan guru dalam pergerakan nasional memang tidak dapat dipisah-

kan dari usaha untuk mendidik bangsa yang terbelakang. Pada masa itu kemampuan guru juga dimanfaatkan oleh media massa pada masa penjajahan untuk menerjemahkan artikel. Dengan demikian ide-ide dapat disampaikan ke tengah masyarakat dalam bahasa Melayu. Guru ... bagian dari rakyat yang bertugas untuk mendidik. Mereka merupakan kelompok yang menyadari keterbelakangan bangsanya. Melihat peran ini guru lebih leluasa bertindak dalam masyarakat.

Ketika pergerakan mulai muncul pada awal abad XX, dan pandangan masyarakat mulai kritis pada awal abad itu, para guru juga mempunyai bobot politik. Mereka menilai bahwa sistem pendidikan kolonial tidak memberikan kesejahteraan rakyat ... bekerja sebagai guru pemerintah kolonial berarti ikut mempertahankan sistem pendidikan penjajah. Kesadaran ini mendorong [kaum nasionalis] ... mendirikan sekolah non-pemerintah, baik yang mendasarkan diri pada agama ataupun sekolah umum. ... orang tertarik untuk menjadi guru. ... banyak [kaum] nasionalis... memanfaatkan sekolah untuk mendidik politik rakyat.

Masuknya kaum nasionalis ke dunia pendidikan ... menambah vitalitas idealisme mereka. Disini [kaum nasionalis] ... memperkuat basis gerakan. Kaum nasionalis membentuk perguruan rakyat yang ditujukan kepada orang dewasa yang sebelumnya tak pernah masuk sekolah. Perguruan itu ternyata kemudian lebih merupakan sekolah politik (Soerjomihardjo, 1980: 52-65).

Proses penyadaran politik melalui lembaga pendidikan nonpemerintah dapat membangkitkan perlawanan terstruktur. Karena itu pemerintah Hindia Belanda melakukan tekanan secara sistematis terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh elit pribumi. Tekanan itu dapat dilihat dalam *Staatblad van Nederlandsch Indie* 1893; *Gods-*

dienstonderwijs Mohammedaansch No. 550, 1905; Ordonansi Guru 1925; dan Ordonansi Sekolah Liar 1932. Pemerintah merasa khawatir bila lembaga pendidikan yang dikelola elit pribumi dapat menyatukan visi politik dan membangkitkan kolektivitas politik anak-anak didik, karena dua faktor tersebut merupakan modal dasar yang harus dimiliki bangsa dalam menghadapi hegemoni kolonial.

Menarik untuk diamati bahwa tokoh-tokoh muslim yang mengenyam pendidikan Barat adalah priyayi-priyayi terkemuka, yang setelah selesai pendidikan memasuki birokrasi pemerintah atau menempatkan diri sebagai tokoh politik pergerakan kebangsaan. Tokoh muslim yang mengenyam pendidikan Barat dan memiliki pemikiran Islam secara 'jernih' dalam menimbang hubungan tidak seimbang dan tidak harmonis antar pribumi dan bangsa Belanda adalah; RM Tirtoadhisoejo (1880-1918), Haji Oemar Said [HOS] Tjokroaminoto (1882-1934), dr. Soetomo (1888-1938), dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1885-1943). Nama-nama tersebut adalah tokoh muslim yang tidak dapat dipisahkan dengan dunia Islam. Ekspresi intelektualitasnya diabdikan untuk membangun opini publik serta membangun kesederajatan, martabat dan harga diri masyarakat (Latif, 2005: 125-143).

Kesadaran sebagai tokoh muslim dan menempatkan diri sebagai tokoh politik pergerakan membangkitkan identitas diri, serta menjadi suri teladan. Dalam pemikiran Sartono Kartodirdjo (Holt, 1972: 113) Islam merupakan identitas politik nasional, dan gerakan politik Islam yang dilancarkan sepanjang abad XIX hingga dasawarsa kedua abad XX ditujukan untuk

melawan eksistensi pemerintah Hindia Belanda. Lebih lanjut dikemukakan:

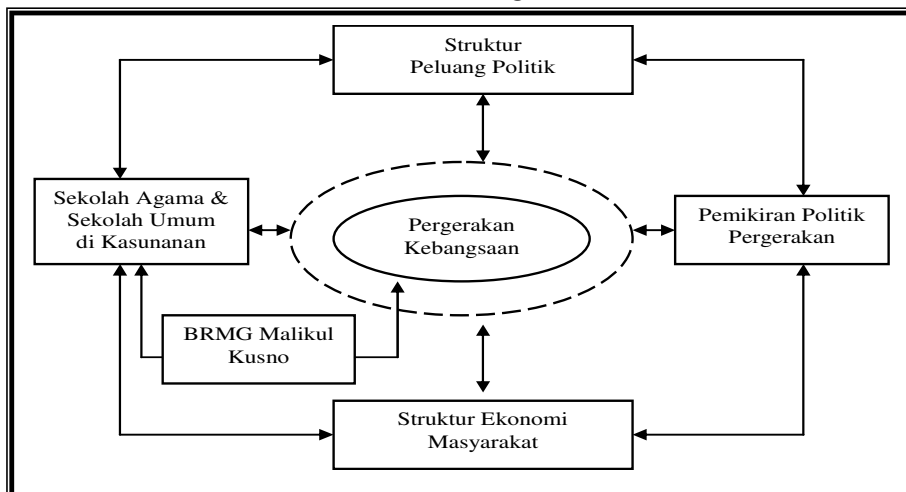
...Islam was seen not as parking off one segment of society from the rest, but as supplying the political definition of "national" identity and the focus of resistance toward colonial ruler. The long-established network of rural religious institutions provided a ready-made system of communication for the spread of this new political role for Islamic concepts and traditions. ...in the two movements next described we shall find a complex blend of political and moral appeals.... (Sartono Kartodirdjo dalam Holt, 1972: 113).

Bangkitnya identitas diri merupakan bentuk kesadaran, yang tidak hanya muncul dalam lingkungan sekolah umum, tetapi juga muncul dalam lingkungan sekolah agama. Kesadaran tersebut sangat dibutuhkan pada saat perpolitikan suatu negara didominasi kekuatan asing. Pada sisi lain meluasnya gejala-gejala perubahan yang disyaratkan oleh kebijakan etis membangkitkan 'euphoria': (1) wacana baru tentang semboyan-semboyan kemaju-

an, perkembangan, pendidikan, dan kesejahteraan; (2) gugatan-gugatan yang secara politis muncul dari wacana-wacana baru yang mereka dipahami; (3) muncul bahasa-bahasa 'eksploitasi' yang diwacanakan oleh tokoh politik pergerakan, khususnya tentang peme-rasan dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda; (4) muncul tokoh-tokoh pergerakan yang berusaha menggalang kekuatan massa dan menentang akar-akar penjajahan di Hindia Belanda.

Lembaga pendidikan yang dibangun BRMG Malikul Kusno berhasil membangkitkan kesadaran dan memacu solidaritas. Pada dasawarsa kedua abad XX, partai politik lokal tumbuh dan menjadi pusat perpolitikan di Jawa. Struktur interaksi BRMG Malikul Kusno dengan dunia pendidikan dan politik dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1: Struktur Interaksi antara BRMG Malikul Kusno, Pendidikan, dan Politik Pergerakan



Pengembangan dari Sumber: Yudi Latif. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, p. 64.

Bagan di atas melukiskan bahwa BRMG Malikul Kusno merupakan tokoh yang memiliki ruang politik dan berpeluang menorehkan sejarah. Torehan sejarah tidak diletakkan pada keinginan untuk mengembalikan kekuasaan geo-politik melalui kolaborasi dengan kolonial, tetapi berusaha merekonstruksi 'batin' kemanusiaannya untuk mendorong mobilitas vertikal kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Diberlakukan politik etis pada 1902, membumbuhkan inspirasi untuk mendirikan sekolah agama dan sekolah umum (Madrasah Mamba'ul Ulum, HIS Kasatryan, dan HIS Pamardi Putri) yang secara struktural membuka peluang politik bagi kelompok-kelompok sosial pinggiran. Pendirian madrasah dan sekolah umum adalah tindakan politis untuk melakukan dekonstruksi politik kolonial, bahkan memacu penguatan nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan landasan orientasi politik. Dengan demikian rakyat terdorong untuk melakukan gerakan perlawanan, dan konsekuensi dari tindakan itu kesediaan elit keraton ikut serta memasuki organisasi sosial dan partai politik lokal, baik Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, maupun Boedi Oetomo.

C. Penutup

Kehadiran sekolah agama dan sekolah umum yang didirikan BRMG Malikul Kusno memberi kesempatan kepada anak-anak 'pribumi' yang belum terakomodasi dalam sistem pendidikan kolonial. Besarnya anak-anak yang tertampung dalam lembaga pendidikan tersebut berkorelasi dengan kesadaran mereka terhadap realitas ekonomi, politik dan sosial. Bahkan dalam kesedrajan martabat yang tidak diliputi bingkai diskriminasi berpengaruh

terhadap mobilitas vertikal serta menciptakan solidaritas sosial. Agama Islam dan kebudayaan Jawa yang diajarkan dalam madrasah dan sekolah umum menyadarkan pentingnya berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga tindakan yang dilakukan dalam konteks politik pergerakan tetap berlandaskan etika dan moral. Faktor terakhir itu yang paling penting dalam hubungannya dengan pendidikan masyarakat yang dilakukan BRMG Malikul Kusno.

Daftar Pustaka

- Adam, A. 2003. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan 1855-1913*, a.b. Amaran Loebis & Mien Joebhaar. Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu & KITLV.
- Adian, D. G. 2008. "Benteng Terakhir Intelektual Republik", *Kompas*, Rabu, 17 September 2008.
- Adnan, A. B. 1982. *Sejarah Singkat Masjid, Kraton Kasunanan, dan Gamelan Sekaten di Surakarta*. Surakarta: Mardikuntaka.
- Anwar, R. 2007. *Semua Berawal dengan Keteladanan: Catatan Kritis*. Jakarta: Buku Kompas.
- Baudet, H. & I.J. Brugmans (ed.). 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, a.b. Amir Stuaarga. Jakarta: YOI.
- Gouda, F. 2007. *Dutch Culture Overseas: Praktek Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942*, a.b. Jugiarie Soegiarto

- & Suma Riella Rusdiarti. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Holt, C. (ed.). 1972. *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Ihsan, M. M. 2003. "Nilai-Nilai Islam dan Modernitas", *Kompas*, Rabu, 5 November 2003.
- Kamdani (ed.). 2007. *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latif, Y. 2005. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan.
- Lombard, D. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I Batas-Batas Pembaratan*, a.b. Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat & Nini Hidayati Yusuf. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, A. S. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Margana, S. 2004. *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Misrawi, Z. (ed.). 2007. *Ibnu Rusyd: Gerbang Pencerahan Timur dan Barat*. Jakarta: Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Moordiati. 2001. "Dinamika Pertumbuhan Penduduk di Karesidenan Surakarta, 1880-1930", *Lembaran Sejarah*, Vol. 4, No. 1.
- Mrazek, R. 2006. *Enginers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah Koloni*, a.b. YOI. Jakarta: YOI.
- Mujani, S. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nagazumi, A. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, a.b. Pustaka Utama Grafiti & KITLV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Robson, S.O. 1981. "Java at the Crossroads", *Biljdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI)*, No. 137.
- Scherer, S. P. 1985. *Keselaran dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Jawa Awal Abad XX*, a.b. Jiman S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan.
- Schrieke, J.J. 1918. *Atoeran Oendang-Oendang Jang Penting-Penting tentang Pembagian Kekoewasaan Ja'itoe Desentralisasi Tahoen 1903 dan tentang Perkampungan Boemi Poetera dan Roekoen-Roekoennya*, a.b. A. Salim. Batavia: Landsdrukkerij.
- Soedarmono, K. & Utomo, R.P. 2004. *Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde Baru*. Penelitian tidak diterbitkan. Surakarta: Solo Heritage Society.
- Soerjomihardjo, A. 1980. "Dialog: Pergerakan Rakyat, Corak dan Tujuan", *Prisma*, No. 11.

Suminto, H. A. 1986. Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken. Jakarta: LP3ES.

Suryo, D. 1980. "Gerakan Petani", *Prisma*, No. 11.

Sutherland, H. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, a.b. Sunarto. Jakarta: Sinar Harapan.

Veur, Paul W. van der. 1969. *Education and Social Change in Colonial Indonesia*. Athens, Ohio: Center for International Studies, Southeast Asia Program, Ohio University.